

Program Pelatihan untuk Penguatan Kapasitas Pengelolaan Usaha BUMDes di Kabupaten Semarang

**Yeterina Widi Nugrahanti¹⁾, Gracella Theotama²⁾, Mitha Dwi Restuti³⁾, Supatmi⁴⁾,
Yefta Andi Kus Noegroho⁵⁾**

^{1,2,3,4,5}Program Studi Akuntansi, Universitas Kristen Satya Wacana, Jawa Tengah, Indonesia

 Email korespodensi: yeterina.nugrahanti@uksw.edu

Submit : 15/09/2025 | Accept : 28/09/2025 | Publish : 30/09/2025

Abstract

Village-Owned Enterprises (BUMDes) play a key role in improving community welfare and supporting rural economic growth. However, many BUMDes in Semarang Regency still face constraints in governance, management, digital readiness, and competitiveness. To address this problem, the Faculty of Economics and Business, Satya Wacana Christian University organized a training program, namely the Satya Wacana BUMdes Academy, aimed at strengthening managerial and governance capacity. The programme involved seven partners of BUMDes through seminar and structured training sessions on institutional governance, finance, business management, digitalization, and business feasibility studies. The seminar was delivered by academic experts and successful BUMDes practitioners, while the training was conducted through lectures, discussions, case studies, pre-test and post-test. The results of the seminar and training program show that BUMDes management team gained improved knowledge and motivation in managing their enterprises. Thus, this program contributes to strengthening BUMDes governance.

Keywords: Governance; BUMDes; Training

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta meningkatkan perekonomian desa. Namun, kenyataannya masih banyak BUMDes di Kabupaten Semarang yang menghadapi tantangan, mulai dari tata kelola kelembagaan, keuangan, pemanfaatan teknologi digital, hingga penguatan daya saing. Menjawab kebutuhan tersebut, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana menyelenggarakan program pelatihan tata kelola BUMDes yang dikemas dalam kegiatan Akademi BUMDes Satya Wacana. Program ini melibatkan tujuh BUMDes mitra melalui rangkaian seminar dan pelatihan terstruktur, dengan materi meliputi tata kelola kelembagaan, keuangan, manajemen, digitalisasi, serta studi kelayakan usaha. Seminar menghadirkan narasumber akademisi dan praktisi pengelola BUMDes yang telah berhasil. Pelatihan disampaikan dengan metode ceramah, diskusi, studi kasus, pre-test dan post-test. Hasil dari kegiatan seminar dan pelatihan menunjukkan peningkatan pengetahuan dan motivasi pengurus BUMDes dalam pengembangan BUMDes. Dengan demikian, program ini berkontribusi dalam penguatan tata kelola BUMDes.

Kata Kunci: Tata Kelola; BUMDes; Pelatihan

PENDAHULUAN

Revolusi Pengembangan desa saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah. Dengan adanya UU No 6/2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015, diharapkan mendorong desa untuk mengelola sumber daya yang ada, salah satunya melalui BUMDes. Mengacu pada UU Desa, tujuan dari pembentukan BUMDes antara lain untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan asli desa. BUMDes dapat digunakan sebagai sarana untuk pemberdayaan masyarakat desa karena sumber daya yang dimiliki desa dapat dikelola oleh warga desa sendiri untuk meningkatkan pendapatan asli desa (Rahayu & Febrina, 2021).

Keberadaan BUMDes juga diharapkan mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Mulianingsih, 2022). Hal ini penting mengingat tingginya tingkat kemiskinan penduduk Indonesia. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2022 sejumlah 26,16 juta orang (9,54%); pada tahun 2023 sejumlah 25,90 juta orang (9,36%), pada tahun 2024 sejumlah 25,22 juta (9,03%), dan sebagian besar penduduk miskin tersebut berada di wilayah pedesaan (www.bps.go.id). Pengentasan kemiskinan tersebut dapat dikurangi dengan pembukaan lapangan kerja melalui usaha BUMDes. Harjanta, (2020); Zunaidah et al., (2021); Rohmah & Yulistiyono, (2023) membuktikan bahwa BUMDes dapat mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat desa.

BUMDes perlu memiliki daya saing agar selalu eksis dan berfungsi optimal untuk pemberdayaan masyarakat serta pengurangan kemiskinan. Data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menunjukkan bahwa jumlah BUMDes di Indonesia pada tahun 2023 sejumlah 60.417, meningkat menjadi 65.941 pada tahun 2024. Namun, dari 65.941 BUMDes, 75,8% BUMDes yang tercatat aktif, sehingga sekitar 16.000 BUMDes tidak beroperasi dan tidak berkontribusi terhadap perekonomian desa (Khaerunnisa, 2024). Belum optimalnya fungsi BUMDes ditengarai karena (1) organisasi BUMDes yang tidak diisi oleh orang yang memiliki jiwa kewirausahaan/bisnis, (2) kesulitan menemukan dan mengembangkan potensi desa, (3) lemahnya promosi kegiatan dan produk yang dimiliki, dan (4) lemahnya tata kelola BUMDes (Hamzah, 2021). BUMDes juga mengalami kendala terkait dengan penggunaan teknologi informasi untuk operasional dan pengembangan BUMDes (Sari *et al.*, 2023).

Salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki banyak BUMDes adalah Kabupaten Semarang, yaitu sejumlah 202 BUMDes. Dari 202 BUMDes, sejumlah 49 (24%) berada dalam kategori dasar, 98 (49%) dalam kategori tumbuh, 37 (18%) dalam klasifikasi berkembang, serta 18 (9%) diklasifikasikan sebagai BUMDes maju. Statistik tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar BUMDes di Kabupaten Semarang belum produktif dan belum berfungsi secara optimal. Observasi pada beberapa BUMDes di Kabupaten Semarang menunjukkan bahwa beberapa BUMDes memiliki kendala dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes, karena kekurangan sumber daya manusia dan pengelola merasa kurang memiliki pengetahuan yang memadai mengenai pengelolaan BUMDes. Sebagai contoh, pengelola BUMDes Bangun Jaya Desa Kesongo merangkap sebagai perangkat desa. BUMDes tersebut didirikan pada tahun 2018 dengan dua unit usaha bank sampah dan wisata kuliner Daringan. Pada awal pembukaan, wisata kuliner Daringan sangat padat pengunjung, namun selama dua tahun terakhir ini sepi, bahkan hanya buka pada hari sabtu dan minggu. Hal ini sangat disayangkan karena Desa Kesongo memiliki kondisi alam yang sangat mendukung untuk pengembangan wisata karena berbatasan langsung dengan Rawa Pening. Kendala yang sama juga terjadi pada BUMDes Samirono yang didirikan pada tahun 2018 dan memiliki unit usaha toko kelontong. Toko ini tidak dapat buka secara rutin karena keterbatasan waktu pengelola. Tidak adanya pembukuan yang akurat juga menyebabkan toko

ini tidak mengetahui secara persis berapa untung atau rugi dari toko tersebut. Selanjutnya, BUMDes Agung Lestari Desa Jombor yang didirikan pada tahun 2020 memiliki unit usaha pengelolaan air bersih, bank sampah dan unit niaga. Selain itu, sejak tahun 2021, BUMDes mempersiapkan unit usaha pengadaan pupuk, namun sampai saat ini belum beroperasi karena terkendala administrasi izin unit usaha. Selanjutnya, BUMDes Maskumambang Desa Kemambang yang berlokasi di lereng gunung dan didirikan pada tahun 2018 memiliki unit usaha pengolahan kopi. Didukung oleh bahan baku yang melimpah, BUMDes Maskumambang mampu menghasilkan produk olahan kopi yang berkualitas dan berpotensi dipasarkan di luar wilayah, namun dengan keterbatasan yang ada dan belum memadainya kemampuan digital marketing pengelola, sebagian besar produk kopi tersebut baru dipasarkan di sekitar desa. Hal yang sama juga terjadi di BUMDes Bergas Mandiri Sejahtera, Desa Bergas Kidul, di mana memiliki unit usaha pengelolaan wisata Embung Silembuh. Namun sejak terjadi pandemi, wisata ini mangkrak sampai tahun 2023. Saat ini sudah dibuka lagi, namun jumlah pengunjung belum sesuai dengan ekspektasi. Selain itu, sebagian besar BUMDes di atas juga belum memiliki dokumen kelembagaan seperti *standard operating procedure*.

Berdasarkan pada identifikasi awal pada BUMDes di Kabupaten Semarang, maka setidaknya terdapat lima permasalahan prioritas yang dihadapi oleh BUMDes di Kabupaten Semarang. Pertama, kurangnya pengetahuan mengenai tata kelola kelembagaan. Belum adanya tingkat pemahaman yang sama dari pengelola BUMDes mengenai peraturan terkait BUMDes, fungsi dan peran organ-organ dalam Bumdes, serta pertanggungjawaban BUMDes sesuai dengan peraturan. Kedua, kelemahan dalam tata kelola manajemen dan sumber daya manusia. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan bisnis, wirausaha dan pengembangan BUMDes. Selain itu, banyak BUMDes memiliki struktur organisasi kurang efektif. Ketiga, kurangnya pengetahuan mengenai tata kelola keuangan BUMDes, termasuk optimalisasi dana yang ada, penyusunan anggaran, *standard operating procedure* aktivitas dan keuangan, pengetahuan alternatif pendanaan serta pembukuan dan pelaporan keuangannya. Ke empat, kurangnya pengetahuan mengenai tata kelola digitalisasi. Belum memadainya pengetahuan dan keterampilan digital pada BUMDes berimplikasi pada branding dan promosi yang masih lemah. Pemasaran produk hanya di tingkat lokal, padahal produk BUMDes berpotensi untuk dipasarkan sampai luar wilayah, nasional bahkan internasional. Selain itu, penyusunan laporan keuangan juga sebagian besar masih manual sehingga kurang efektif dan efisien. Ke lima, kurangnya inovasi dan daya saing. Produk atau layanan BUMDes kurang inovatif dan kurang mampu bersaing di pasar. Hal ini perlu ditinjau ulang mengenai kelayakan usaha yang ada serta upaya inovasi melalui studi kelayakan usaha baru.

Bercermin dari permasalahan BUMDes tersebut, maka dibutuhkan mitra bagi BUMDes untuk menjalankan fungsinya secara optimal. Civitas Akademik sebagai agen perubahan diharapkan dapat berkontribusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karena itu, sebagai bentuk kontribusi serta kolaborasi dengan masyarakat, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana bermaksud untuk menjalankan program akademi BUMDes. Program Akademi BUMDes Satya Wacana mencakup pelatihan dan pendampingan bagi pengurus BUMDes terkait dengan tata kelola kelembagaan, keuangan, manajemen, digitalisasi serta studi kelayakan usaha untuk pengembangan BUMDes. Pelatihan ini ditujukan untuk mengembangkan kualitas dan kompetensi SDM untuk mendukung BUMDes yang produktif, memiliki daya saing serta *sustainable*, sehingga dapat mewujudkan peran dan fungsi dari BUMDes.

METODE KEGIATAN

Pelaksanaan program pelatihan dikemas dengan kegiatan Akademi BUMDes Satya Wacana. Kegiatan mencakup seminar dan pelatihan yang diberikan kepada 7 BUMDes di Kabupaten Semarang yang selama ini telah bermitra dengan Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW, yaitu BUMDes Bangun Jaya Desa Kesongo, BUMDes Samirono Mandiri Desa Samirono, BUMDes Agung Lestari Desa Jombor, BUMDes Maskumambang Desa Kemambang, BUMDes Bergas Mandiri Sejahtera Desa Bergas Kidul, BUMDes Sembada Desa Watuagung, dan BUMDes Selonatah Desa Padaan. Seminar dilaksanakan dalam 1 hari yaitu pada tanggal 28 April 2025. Seminar menghadirkan beberapa narasumber untuk menyampaikan materi tentang penguatan kapasitas pengelolaan usaha. Berikutnya, dilakukan pelatihan dengan setiap BUMDes mengirimkan 3 orang pengurusnya untuk mengikuti pelatihan yang diadakan di kampus FEB UKSW selama 2 hari pada tanggal 29-30 April 2025. Materi yang disampaikan adalah terkait dengan tata kelola kelembagaan, keuangan, manajemen, digitalisasi serta studi kelayakan usaha untuk pengembangan kapasitas BUMDes.

Tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan pelatihan tersebut sebagai berikut:

1. Penyamaan persepsi antar Tim Penyusun Program melalui kegiatan diskusi
2. Pengkoordinasian dan *Forum Group Discussion* (FGD) dengan mitra untuk mengidentifikasi lebih dalam mengenai permasalahan yang dihadapi BUMDes dan memberikan penjelasan mengenai program beasiswa akademi BUMDes
3. Penyusunan modul pelatihan BUMDes, meliputi modul tata kelola kelembagaan, tata kelola keuangan, tata kelola manajemen, tata kelola digitalisasi dan tata kelola studi kelayakan usaha.
4. Pelaksanaan seminar tata kelola bumdes
5. Pelatihan kepada pengurus BUMDes melalui skema beasiswa Akademi BUMDes. Pelatihan ini diadakan secara terstruktur selama dua hari dengan metode ceramah, diskusi, studi kasus, dan *pre-test*. Pelatihan akan diakhiri dengan uji kompetensi (*post test*) bagi peserta pelatihan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Seminar Tata Kelola dan Akuntabilitas Bumdes

Kegiatan pelatihan untuk penguatan kapasitas pengelolaan usaha BUMDes pada tahap pertama dilakukan dengan seminar bertajuk Tata Kelola dan Akuntabilitas Bumdes untuk Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Hari Senin, 28 April 2025, di Balairung Utama UKSW. Pemateri seminar terdiri dari tiga narasumber. Pertama, Arthik Davianti, PhD, yang membawakan materi terkait tata kelola dan akuntabilitas BUMDes dari sudut pandang akademisi. Kedua, Suyantoko SPt, pengelola BUMDes Tirta Mandiri, Desa Ponggok, Kabupaten Klaten. Ketiga, Bambang Nugroho, SE., MM, pengelola BUMDes Aji Bodronoyo, Desa Sumowono, Kabupaten Semarang. Kedua BUMDes tersebut dipilih sebagai narasumber karena memiliki profil bisnis dan kinerja yang baik, serta memiliki kontribusi signifikan terhadap pendapatan desa. Omset yang diperoleh BUMDes Tirta Mandiri mencapai Rp 14,2 milyar pada tahun 2017 Dana, (2025); Baskoro, (2017), bahkan BUMDes menyerahkan 40% laba bersihnya untuk pendapatan desa (Izzah & Kolopaking, 2020). Selanjutnya, BUMDes Aji Bodronoyo memiliki aset sebesar Rp 2 miliar pada tahun 2024 (Rohman, 2025).

Seminar ini diikuti oleh 40 pengurus BUMDes Kabupaten Semarang, 208 mahasiswa akuntansi FEB UKSW, 20 staf dan pimpinan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah, serta 24 dosen UKSW. Pelibatan mahasiswa akuntansi sebagai peserta dalam seminar ini dengan harapan bahwa mahasiswa akan terlibat

dalam pendampingan tata kelola BUMDes yang terintegrasi dengan mata kuliah, yang akan dilaksanakan sebagai program lanjutan dari kegiatan pelatihan ini.

Penyampaian materi pertama oleh Arthik Davianti, PhD dimulai dengan pemaparan definisi dan urgensi pembangunan berkelanjutan, serta penjelasan 18 tujuan pembangunan desa berkelanjutan antara lain desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, keterlibatan perempuan desa, dan sebagainya. Pembahasan materi berikutnya difokuskan pada peran BUMDes dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan, refleksi tata kelola dan akuntabilitas BUMDes saat ini, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperkuat tata kelola dan akuntabilitas dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pemaparan materi yang kedua disampaikan oleh Suyantoko SPt mengenai kisah sukses BUMDes Tirta Mandiri agar dapat memotivasi pengurus BUMDes dalam pengembangan BUMDes. Pemaparan materi dimulai dengan membahas transformasi Desa Ponggok dari desa miskin menjadi desa mandiri, analisa data permasalahan sebagai sistem informasi pendukung pengambilan keputusan desa, jenis usaha BUMDes Tirta Mandiri, kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes, upaya pengembangan BUMDes hingga memperoleh omset milyaran rupiah, serta peran BUMDes dalam penciptaan lapangan kerja dan penguatan perekonomian desa.

Materi ketiga disampaikan oleh Bambang Nugroho, SE.,MM yang juga membawakan kisah sukses BUMDes Aji Bodronoyo. Pemaparan materi dimulai dengan membahas profil BUMDes, termasuk unit usaha yang dimiliki, yang terdiri dari pasar desa, lembaga keuangan mikro, toko online dan layanan jasa pengiriman. Pembahasan selanjutnya difokuskan pada peran BUMDes dalam perekonomian desa, yang meliputi penciptaan lapangan kerja dan kontribusi dalam pendapatan asli desa, kendala serta upaya yang dilakukan BUMDes untuk mencapai laba tinggi. Selain itu, BUMDes juga bekerja sama dengan berbagai institusi untuk mendukung pengelolaan usahanya, antara lain dengan BRI, Bank Jateng, dan Badan Pendapatan Daerah Jawa Tengah.

Penyampaian materi oleh ketiga narasumber tersebut diharapkan dapat memotivasi BUMDes untuk terus mengembangkan usahanya di tengah-tengah banyaknya kendala yang dihadapi. Setelah pemaparan materi, acara seminar dilanjutkan dengan sesi diskusi. Antusiasme peserta BUMDes ditunjukkan dengan banyaknya tanggapan dan pertanyaan yang ditujukan kepada pemateri, khususnya terkait kiat-kiat bagaimana mengelola usaha agar terus berkembang dan bagaimana cara mengakses kerja sama dengan institusi lain untuk mendukung usaha BUMDes. Dokumentasi pelaksanaan seminar ditunjukkan dalam gambar 1,2, dan 3 sebagai berikut:



Gambar 1. Dokumentasi Peserta Seminar



Gambar 2. Penyampaian Materi oleh Narasumber



Gambar 3. Sesi Diskusi

Pelaksanaan Pelatihan Tata Kelola BUMDes

Pelaksanaan program pelatihan tata kelola BUMDes dilakukan selama dua hari, pada tanggal 29 - 30 April 2025. Total peserta sebanyak 16 orang yang terdiri dari 3 orang BUMDes Bangun Jaya Desa Kesongo, 2 orang dari BUMDes Samirono Mandiri Desa Samirono, 2 orang dari BUMDes Agung Lestari Desa Jombor, 2 orang dari BUMDes Maskumambang Desa Kemambang, 3 orang BUMDes Bergas Mandiri Sejahtera Desa Bergas Kidul, 1 orang dari BUMDes Sembada Desa Watuagung, dan 3 orang dari BUMDes Selonatah Desa Padaan. Adapun narasumber pelatihan ini adalah pada dosen dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana.

Pelatihan pada hari pertama dimulai dengan *pre-test* mengenai pengetahuan dasar BUMDes. Pelatihan dimulai dengan materi Tata Kelola Kelembagaan yang dibawa oleh Dr. Gustin Tanggulangan, SE., M. Ak. Penyampaian oleh narasumber dilakukan dengan pemaparan dan penjelasan materi. Materi Tata Kelola Kelembagaan mencakup pembahasan dasar hukum dan prinsip tata kelola kelembagaan BUMDes, identifikasi struktur organisasi BUMDes dan peran masing-masing organ (Musyawarah Desa, Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas), anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDes sesuai ketentuan perundang-undangan. Program kerja kelembagaan BUMDes yang selaras dengan RPJMDes dan RKPDes, peraturan internal kelembagaan dan SOP organisasi BUMDes, mekanisme laporan pertanggungjawaban kelembagaan BUMDes dan menilai penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, profesionalisme, dan keberlanjutan dalam pengelolaan kelembagaan BUMDes. Setelah pemaparan materi dilanjutkan dengan diskusi dengan peserta mengenai praktik dan permasalahan di BUMDes terkait dengan tata kelola kelembagaan.

Sesi yang kedua dilanjutkan dengan materi Tata Kelola Keuangan yang dibawa oleh Dr. Elisabeth Penti Kurniawati, SE., M.Ak. Penyampaian materi dibawa dengan pemaparan dan penjelasan mengenai materi. Materi Tata Kelola Keuangan terdiri dari

prinsip-prinsip tata kelola keuangan BUMDes menurut PP 11 Tahun 2021 dan Permendesa 2 Tahun 2021, anggaran penerimaan dan pengeluaran BUMDes, laporan keuangan BUMDes, standar operasional prosedur aktivitas usaha BUMDes, standar operasional prosedur keuangan BUMDes. Pemaparan materi kemudian dilanjutkan dengan diskusi dengan peserta mengenai praktik dan permasalahan di BUMDes terkait dengan tata kelola keuangan.

Sesi yang ketiga dilanjutkan dengan materi Tata Kelola Digitalisasi yang dibawakan oleh Jean Stevani Matitaputty, SE., M.Ak.. Materi Tata Kelola Digitalisasi terdiri dari cara identifikasi keunggulan dan potensi produk/jasa BUMDes yang layak dipasarkan, merancang strategi promosi *online* yang efektif untuk produk/jasa BUMDes, membuat konten promosi yang menarik dan sesuai dengan karakteristik target pasar, membangun dan mengelola citra positif BUMDes melalui media sosial dan media massa lokal, menerapkan strategi komunikasi yang membangun hubungan baik dengan pelanggan dan komunitas. Setelah pemaparan materi kemudian peserta diminta untuk melakukan analisis target market usaha BUMDes. Peserta juga diajak untuk melakukan perancangan digitalisasi yang akan dilakukan untuk usaha yang dilakukan BUMDes. Sesi hari pertama ditutup dengan melakukan *post-test* mengenai tata kelola kelembagaan, keuangan, dan digitalisasi.

Pelaksanaan pelatihan hari kedua dimulai dengan *pre-test* dan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai Tata Kelola Manajemen yang disampaikan oleh Prof. Dr. Theresia Woro Damayanti, SE., M.Si., Akt. CA. Materi Tata Kelola Manajemen terdiri dari pengelola BUMDES yang memiliki mindset berusaha yang jelas dalam rangka mengembangkan usaha-usaha di BUMDES, pengelola BUMDES yang memahami prinsip-prinsip kepemimpinan yang harus dimiliki dalam mengelola BUMDES, pengelola BUMDES memiliki keterampilan dalam memecahkan masalah-masalah yang biasanya dihadapi dalam pengelolaan BUMDES. Setelah pemaparan materi dilanjutkan dengan diskusi mengenai pengalaman tata kelola manajemen yang selama ini sudah dilakukan oleh BUMDes dan permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes.

Sesi berikutnya adalah audiensi dengan Asisten Deputi Ketahanan Desa dan Pedesaan dari Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, yaitu Dr. Suwatin, MA. Dalam audiensi ini, dilakukan diskusi dengan Pimpinan Fakultas Ekonomika dan Bisnis dan seluruh peserta pelatihan untuk berdialog mengenai prospek kerjasama dalam akses peningkatan kapasitas dan akses pendanaan BUMDes. Dalam diskusi tersebut disampaikan skema dan metode pelatihan tata kelola pelatihan BUMDes dan prospeknya, dan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian dari BUMDes untuk mempresentasikan hasil kerja dan terobosan kebutuhan akses pelatihan yang diperlukan BUMDes serta pendorong akses pendanaan bagi BUMDes. Audiensi diakhiri dengan peserta pelatihan BUMDes memberikan testimoni terkait dengan pelatihan dan diskusi mengenai permasalahan yang dihadapi BUMDes. Diskusi tersebut juga diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah dalam mencetuskan program guna mengatasi kendala yang dihadapi BUMDes.

Sesi terakhir pada hari kedua mengenai Studi Kelayakan Usaha yang disampaikan oleh Geacella Theotama, SE., M.Ak. Materi Studi Kelayakan Usaha terdiri dari tujuan studi kelayakan usaha, tahapan studi kelayakan, prinsip serta regulasi dan pedoman dalam studi kelayakan usaha BUMDes. Pembahasan berikutnya mengenai aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam studi kelayakan usaha BUMDes, yaitu aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan operasional, aspek finansial, aspek hukum dan kelembagaan, aspek sosial dan lingkungan, serta etika, dan dilanjutkan dengan contoh studi kelayakan usaha. Setelah pemaparan materi, kemudian peserta diminta untuk melakukan penyusunan studi kelayakan usaha dengan kasus sederhana dan kemudian mendiskusikannya. Sesi hari kedua ditutup dengan melakukan *post-test* mengenai tata kelola manajemen dan studi kelayakan usaha. Sebelum dilakukan penutupan, peserta diminta untuk memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan tata kelola BUMDes. Semua peserta menyatakan bahwa mereka

mendapat pengetahuan dan pengalaman berharga dari pelatihan tersebut. Dokumentasi kegiatan pelatihan tata kelola ditunjukkan dalam gambar 4, 5, 6, dan 7 sebagai berikut.



Gambar 4. Dokumentasi Asisten Deputy Menteri dan Peserta Pelatihan



Gambar 5. Sesi Pelatihan Studi Kelayakan Usaha BUMDes



Gambar 6. Sesi Diskusi Pelatihan Tata Kelola BUMDes



Gambar 7. Diskusi Kendala BUMDes dengan Asisten Deputy Bidang Ketahanan Desa dan Perdesaan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat

SIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan seminar dan pelatihan tata kelola BUMDes yang telah diselenggarakan selama tiga hari pada tanggal 28-30 April 2025 telah memberi kontribusi nyata dalam peningkatan kapasitas tata kelola BUMDes. Hasil seminar dan pelatihan menunjukkan bahwa pengurus BUMDes menjadi lebih bersemangat dan termotivasi untuk mengembangkan BUMDes dengan adanya *sharing* kisah sukses dari BUMDes Tirta Mandiri Ponggok dan BUMDes Aji Bodronoyo Sumowono. Selain itu, hasil pelatihan juga menunjukkan bahwa peserta memperoleh pengetahuan baru mengenai dasar hukum, prinsip, praktik tata kelola BUMDes yang baik, termasuk dalam tata kelola kelembagaan, keuangan, digitalisasi, manajemen, serta studi kelayakan usaha. Peserta pelatihan juga memperoleh alternatif solusi atas kendala tata kelola yang dihadapi BUMDes selama ini. Secara keseluruhan, pelatihan ini berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam mengelola BUMDes secara efektif dan efisien.

Kegiatan pelatihan ini masih terbatas dilakukan pada tujuh BUMDes, oleh karena itu pengabdian berikutnya diharapkan dapat diperluas pada BUMDes lain di Kabupaten Semarang. Selain itu pendampingan intensif dengan melibatkan kolaborasi antara dosen dan mahasiswa FEB UKSW, serta pemerintah juga akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari pelatihan ini, dengan harapan dapat memperkuat peran BUMDes sebagai motor penggerak perekonomian desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Kristen Satya Wacana yang memberikan dukungan secara materiil dalam bentuk hibah internal pengabdian masyarakat dengan Nomor 001/WR-RIK/02/2025. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para peserta pelatihan akademi BUMDes yang telah berpartisipasi sehingga program ini dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Baskoro, L. R. (2017). *Andalkan Umbul Ponggok, BUMDes di Klaten Ini Raup 14 M Setahun*.
<https://www.tempo.co/ekonomi/andalkan-umbul-pongok-bumdes-di-klaten-ini-raup-14-m-setahun-1010840>
- Dana, L. U. (2025). *Salut! Desa Ponggok Raih Pendapatan Rp 14 M Per Tahun, Apa Rahasianya?*
- Harjanta, S. (2020). *Peran BUMDES dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi kasus BUMDES Panggungharjo, Bantul dan Tridadi, Sleman*. 2(2), 1–9.
- Izzah, K. D., & Kolopaking, L. M. (2020). Manfaat Badan Usaha Milik Desa dan Kesejahteraan Masyarakat Lapisan Bawah. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat* [JSKPM], 4(1), 37–54.
<https://doi.org/10.29244/jskpm.4.1.37-54>
- Khaerunnisa, R. (2024). *BPKP Sebut Baru 75,8 Persen BUMDes di Indonesia yang Aktif*.
<https://www.antaranews.com/berita/4392098/bpkp-sebut-baru-758-persen-bumdes-di-indonesia-yang-aktif>
- Mulianingsih, S. (2022). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mendukung Pengentasan Kemiskinan Desa. *Jurnal Registratie*, 4(1), 10–21.
<https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v4i1.2405>
- Rahayu, S., & Febrina, R. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Bumdes Di Desa Sugai Nibung. *Jurnal Trias Politika*, 5(1), 49–61. <https://doi.org/10.33373/jtp.v5i1.2905>
- Rohmah, B. Q., & Yulistiyono, H. (2023). Dampak Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

- Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Desa Bira Tengah Kecamatan Sakobanah Kabupaten Sampang. *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 3(1), 80–94. <https://doi.org/10.21107/bep.v3i1.18505>
- Rohman, A. (2025). *BUMDes Aji Bodronoyo, Juara Berkat Aplikasi Lawan Rentenir*. <https://kanaldesa.com/artikel/bumdes-aji-bodronoyo-juara-berkat-aplikasi-lawan-rentenir>
- Sari, R. P., Lutfia, C., & Soemarsono, P. N. (2023). Pengelolaan Keuangan Bumdes Di Era Digital Melalui Manajemen Sumber Daya Manusia. *JEMB-Jurnal Ekonomi ...*, 2(1), 18–35.
- Zunaidah, A., Askafi, E., & Daroini, A. (2021). Peran Usaha Bumdes Berbasis Pertanian Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Manajemen Agribisnis: Jurnal Agribisnis*, 21(1), 47–57.